

Sejarah Pembentukan Organisasi Wirawati Catur Panca (1976-1977)

Aulia Megirindra Anjani¹ Agus Setiawan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Email: auliaanjani70@gmail.com¹, alagsha2000@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai sejarah pembentukan organisasi perempuan bernama Wirawati Catur Panca. Dalam proses penelitian digunakan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan reuni nasional dan pendirian organisasi yang didapatkan melalui karya tulis maupun arsip pribadi organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi data, hingga penulisan sejarah atau historiografi. Masa awal pembentukan Wirawati Catur Panca ditandai dengan kegiatan reuni nasional pada tanggal 06-08 Maret 1976 yang ditujukan bagi para eksponen pejuang perempuan Angkatan 45. Penyelenggaraan reuni tersebut tidak dapat dipisahkan dari inisiasi dan peran Ibu Tien Soeharto. Beliau juga berperan menyumbangkan gagasan untuk membentuk suatu wadah yang memobilisasi mantan anggota kelaskaran perempuan dan eksponen pejuang perempuan. Makna pelaksanaan reuni bagi pembentukan Wirawati Catur Panca tidak hanya menjadi momen tepang sono melainkan menghasilkan keputusan jangka panjang yang diwujudkan melalui pembentukan organisasi. Dalam perkembangannya, Wirawati Catur Panca berkontribusi dalam mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pendiriannya membawa warna baru gerakan perempuan dalam bidang pendidikan dan bidang sosial di Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini.

Kata Kunci : Wirawati Catur Panca, Organisasi Perempuan, Pergerakan Perempuan

Abstract

This research discusses the history of the formation of a women's organization called Wirawati Catur Panca. In the research process, several documents related to the implementation of the national reunion and the establishment of the organization were used which were obtained through written works or the organization's personal archives. The method used in this research are historical research methods namely heuristics, source criticism, data interpretation, to writing history or historiography. The early period of the formation of Wirawati Catur Panca was marked by a national reunion activity on March 06-08 1976 which was intended for exponents of female fighters from the 45th Generation. The holding of this reunion could not be separated from the initiation and role of Mrs. Tien Soeharto. She also plays a role in contributing ideas to form a forum that mobilizes former members of the women's class and exponents of women fighters. The meaning of carrying out the reunion for the formation of Wirawati Catur Panca is not only a tepang sono moment but rather it results in long-term decisions that are realized through the formation of an organization. In its development, Wirawati Catur Panca contributed to developing the welfare of members and the community. Her establishment brought a new color to the women's movement in the field of education and social affairs in Indonesia which has survived to this day

Keywords : Wirawati Catur Panca, Women's Organization, Women's Movement

A. Pendahuluan

Sejarah pergerakan perempuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika historiografi Indonesia yang masih didominasi oleh peran laki-laki, khususnya dalam bidang politik dan militer. Perempuan sebagai gender sering kali diposisikan sebagai "*second sex*" dalam historiografi Indonesia. Sedangkan, narasi mengenai sejarah perempuan sudah ada pada zaman Kolonial Hindia Belanda pada saat Raden Ajeng Kartini memberikan sumbangsih pemikirannya kepada masyarakat Indonesia mengenai eksistensi gender perempuan. Tokoh perempuan tidak hanya terbatas kepada Kartini saja, muncul tokoh perempuan lain yang dikenal melalui perjuangan bersenjata seperti Cut Nyak Dien yang melawan penjajahan kolonialisme.

Seiring berjalannya waktu, pergerakan perempuan di Indonesia berkembang dan meluas menyesuaikan waktu dan isu dominan yang sedang berlangsung. Kondisi Indonesia yang telah merdeka dari jajahan bangsa asing, membuat gerakan perempuan berubah haluan dari yang semula bergerak dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kini lebih condong ke arah pelestarian semangat dan nilai-nilai 45 serta perbaikan kesejahteraan eks-anggota kelaskaran perempuan. Setelah peristiwa penyerahan kedaulatan berlalu, para eksponen pejuang perempuan mulai menata dan menjalani kehidupan masing-masing.

Pada tahun 1974 di Istana Merdeka Jakarta, dalam momen penurunan bendera di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-29, Ibu Tien Soeharto dihadapkan dengan beberapa tokoh pejuang perempuan pada Periode Revolusi Kemerdekaan. Berawal dari sapa, pertemuan tersebut berhasil membangkitkan kenangan di masa revolusi

dan mencetuskan gagasan terkait pelaksanaan reuni nasional (Hadi Soewito, 1992:83). Dua tahun kemudian, pada tahun 1976 diadakan sebuah reuni nasional yang ditujukan bagi para eksponen pejuang perempuan 45. Kegiatan reuni tersebut menghasilkan ketetapan untuk membentuk organisasi baru yang mewadahi eksponen pejuang perempuan 45 baik yang berjuang di garis depan maupun di garis belakang. Wadah tersebut kemudian berhasil didirikan pada tahun 1976 dan disahkan melalui Akta Pendirian pada tahun 1977 dengan nama Wirawati Catur Panca.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah yang terdiri dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi data dan penulisan sejarah (historiografi). Sumber utama penelitian ini berupa karya tulis dan arsip tekstual yang didapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Museum Joang 45, Kantor Sekretariat Wirawati Catur Panca.

Tahapan penelitian ini bermula dari pemilihan topik mengenai gerakan perempuan Indonesia dengan spesifik organisasi Wirawati Catur Panca. Pencarian sumber arsip tekstual melalui arsip pribadi Wirawati Catur Panca seperti Akta Pendirian, Anggaran Dasar, hingga Anggaran Rumah Tangga. Sumber lain berupa hasil rapat pleno Wirawati Catur Panca hingga Hasil Musyawarah Nasional. Penulis menggunakan sumber sekunder berupa buku yang diterbitkan oleh Wirawati Catur Panca seperti buku "Lahirnya Kelaskaran Wanita dan Wirawati Catur Panca" terbitan 1992.

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini adalah kritik sumber berupa kritik intern dan ekstern. Kritik ekstern dilakukan demi

menguji otentik, keaslian, turunan sumber data yang ada. Kritik intern dilakukan untuk menguji kandungan isi dalam sumber data. Selanjutnya tahapan penelitian ini adalah interpretasi. Menurut Kuntowijoyo interpretasi sejarah adalah penghubungan fakta-fakta yang telah ditemukan hingga mengartikan dan mengolahnya menjadi rekonstruksi sejarah yang utuh. Interpretasi dibagi menjadi dua yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) (Kuntowijoyo, 2003:23). Pada tahap ini penulis menggabungkan fakta-fakta yang telah dikritik menjadi satu runtutan peristiwa sejarah yang kronologis.

Tahapan akhir dari penelitian ini adalah penulisan sejarah. historiografi merupakan penulisan hasil interpretasi berdasarkan sumber yang ditemukan menjadi tulisan sejarah yang baru (Gottschalk, 1996:15). Hasil penulisan ini menjadi tulisan sejarah gerakan wanita dengan konsentrasi organisasi Wirawati Catur Panca.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Pola Pergerakan Perempuan di Indonesia

Aktivitas perempuan di Indonesia yang muncul di tengah masyarakat melalui organisasi merupakan bagian dari gerakan perempuan yang terbentuk dalam periode politik yang panjang. Aktivitas tersebut merepresentasikan corak pergerakan yang menyesuaikan prioritas isu dan kondisi politik yang terjadi. Meskipun demikian, aktivitas perempuan dalam organisasi pada periode politik yang berbeda memperlihatkan adanya proses berkesinambungan yang menjadi bukti bahwa suatu peristiwa tidak ada yang dapat berdiri sendiri melainkan saling bertautan (Pertiwi, 2012).

Sebelum organisasi perempuan terbentuk secara masif pada periode Revolusi Kemerdekaan, kata “gerakan perempuan” secara masif muncul pada

masa akhir Kolonial. Adanya peralihan kesadaran dari kesadaran individu yang ditandai oleh kemunculan sosok Kartini melalui protes yang ia gaungkan dalam surat-suratnya mengilhami terbentuknya gerakan feminis nasional yang melekat dengan peristiwa kebangkitan nasional. Terbentuknya gerakan feminis nasional tersebut dapat dilihat melalui kemunculan organisasi-organisasi perempuan yang menyuarakan isu seputar perkawinan dan pendidikan modern melalui kongres dan surat kabar. Keberadaan organisasi dan kongres menjadi wadah yang lebih besar untuk menyalurkan keprihatinan perempuan terhadap isu-isu seputar kehidupannya sekaligus menandai terjadinya peralihan kesadaran dari kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif dalam mewujudkan perubahan yang adil pada struktur sosial masyarakat yang dinilai timpang.

Munculnya kesadaran kolektif perempuan melalui pembentukan organisasi tidak hanya menjadi jantung pergerakan pada awal abad ke-20 melainkan jantung pergerakan perempuan bagi periode politik selanjutnya. Pada Periode Revolusi Kemerdekaan, pergerakan perempuan melalui organisasi semakin berkembang secara masif dengan bidang yang bervariasi. Terbukanya peraturan yang membatasi perempuan beretika dalam lingkungan sosial dan berperilaku dengan lawan jenis (Lucas & Cribb, 1997) memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bertindak dan mengekspresikan diri dalam perjuangan dibandingkan dua periode politik sebelumnya.

Jika organisasi-organisasi perempuan pada masa Kolonial bersifat kultural dan sosial – dengan memperjuangkan nilai-nilai baru sebagai upaya menonjolkan peran “ibu bagi masyarakatnya” melalui pendidikan modern bagi perempuan, isu perkawinan, serta upaya untuk memperbaiki kedudukan perempuan di

dalam keluarga maupun masyarakat - organisasi perempuan pada Periode Revolusi Kemerdekaan tampil dengan perluasan pergerakan organisasi yang terintegrasi dalam bidang politik, sosial, keagamaan, pendidikan, hingga pertahanan.

Terbentuknya organisasi-organisasi perempuan yang berdiri pada Periode Revolusi Kemerdekaan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari unsur-unsur organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Pendudukan Jepang. Dengan mendorong perempuan untuk bergabung dan aktif mengikuti pelatihan dalam organisasi Fujinkai, Fujinkai menjadi organisasi yang memainkan peran penting dalam memobilisasi perempuan. Perempuan dilatih secara teknis di berbagai bidang seperti memintal benang untuk pembuatan pakaian, perawatan kesehatan dan pendistribusian obat-obatan di masa perang, menjalankan dapur umum, hingga pelatihan semimiliter. Melalui pelatihan yang semula ditujukan untuk mendukung kepentingan pendudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, keterampilan tersebut membawa pengaruh penting dan umpan balik positif untuk mendukung perjuangan perempuan melalui organisasi pada Periode Revolusi Kemerdekaan.

Fokus pergerakan perempuan yang sebelumnya menempatkan perempuan dalam tugas mendidik generasi baru (Stuers, 2017:179) berkembang pada aktivitas pendukung perjuangan. Bergabungnya perempuan ke dalam organisasi-organisasi perjuangan bersenjata menjadi bukti nyata bahwa perempuan turut mengambil peran dalam bidang pertahanan yang memungkinkan mereka bersinggungan dengan konsep Jawa *deles* saat di front perjuangan. Adapun organisasi-organisasi perempuan yang secara khusus dibentuk berlandaskan unsur pertahanan adalah Laskar Wanita Indonesia (1945), Laskar Putri Indonesia (1945), Wanita Pembantu Perjuangan (1946), dan Barisan Putri (1945).

Kontribusi perempuan dalam organisasi khususnya organisasi bersenjata memainkan peran penting dalam menyeimbangkan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi-organisasi tersebut menjadi medium perjuangan perempuan dalam mempertahankan kemerdekaan bersama kaum pria yang terkoordinir dalam berbagai organisasi. Munculnya kesadaran bahwa revolusi tidak akan tercapai tanpa peran mutlak antara laki-laki dan perempuan memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat dan negara adalah persoalan perempuan dan laki-laki, bukan persoalan salah satu pihak saja. Dengan demikian, baik peran laki-laki maupun perempuan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam revolusi kemerdekaan Indonesia terutama dalam menjalankan kewajiban untuk membangun dan kewajiban untuk mempertahankan negara.

C.2 Pembentukan Organisasi Kelaskaran Perempuan dalam Periode Revolusi Kemerdekaan

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 secara nyata membawa perubahan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Menyerahnya Jepang dalam Perang Asia Timur Raya ke tangan sekutu tidak langsung membuat sekutu menggantikan peran Jepang di Indonesia selama beberapa waktu. Di tengah kekosongan politik namun masih harus menghadapi Jepang yang mempertahankan status quo, para elit Indonesia memanfaatkan atmosfer anarki tersebut untuk mewujudkan kemerdekaan. Sementara itu munculnya kekuatan dalam diri masyarakat Indonesia akibat represi Kolonial dan Jepang, diiringi bayang-bayang intervensi sekutu yang tidak diketahui secara pasti tujuan, rencana, serta jumlah kekuatan yang dimiliki menyebabkan ketegangan pada seluruh lapisan masyarakat yang menjurus pada tindakan-tindakan revolusioner. Tidak dapat dipungkiri jika kekacauan politik tersebut

memberikan celah yang mendorong terbentuknya generasi muda militan yang menginginkan suatu perubahan melalui perjuangan revolusioner.

Adanya kebutuhan untuk membentuk suatu unit militer nasional sebagai elemen penting menjadi sebuah negara efektif diputuskan oleh PPKI dalam sidang ketiga 22 Agustus 1945. PPKI memutuskan untuk membentuk tiga wadah perjuangan dimana satu diantaranya ialah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kelahiran Badan Keamanan Rakyat sebagai produk perjuangan di tengah-tengah kancah perjuangan nasional tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pendahulunya seperti PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho. Disamping pembentukan BKR sebagai badan keamanan resmi yang dibentuk oleh pemerintah, para pemuda yang merasa tidak puas dengan pembentukan BKR mendirikan badan-badan perjuangan dan organisasi kelaskaran. Para pemuda yang masuk ke dalam golongan ini terdiri dari mereka yang selama pendudukan Jepang telah membentuk gerakan-gerakan perjuangan bawah tanah atau pemuda-pemuda yang telah memiliki orientasi politik tertentu (Notosusanto, 1985: 36-38; Smail, 2011: 37-38).

Gambar C.2.1

Laskar Wanita sedang berlatih kemiliteran menggunakan senjata tiruan



senjata tiruan

Sumber: Sistem Informasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. ID 15032-3 IPPHOS.1946.1946.1946-1932. Diakses melalui: <https://anri.sikn.go.id/index.php/tampak-laskar-wanita-sedang-berlatih-kemiliteran-dengan-senjata-tiruan>. Pada tanggal 12 April 2023 pukul 20.00 WIB.

Tersiarinya kabar mengenai kemerdekaan dan keputusan membentuk badan keamanan nasional mendapatkan respon baik bagi kaum perempuan. Tidak sedikit perempuan yang bergabung dengan laskar perjuangan yang mengharuskan mereka terlibat langsung dengan penggunaan senjata. Pada tanggal 12 Oktober 1945, didirikan organisasi perempuan bersenjata pertama bernama Laskar Wanita Indonesia (LASWI) oleh Ny. Yati Arudji di Bandung. Anggota LASWI berasal dari remaja-remaja putri kalangan pelajar dan mereka yang sebelumnya pernah tergabung dalam Barisan Srikandi dan juga Pemuda Putri Indonesia (PPI) (Wieringa, 2010:148). Sebagai organisasi yang dibentuk untuk kepentingan pertahanan kemerdekaan Indonesia, anggota LASWI mendapatkan pelatihan kemiliteran seperti strategi berperang dan penggunaan senjata dari pemuda-pemuda TKR dan pemuda-pemuda laskar yang pada masa Pendudukan Jepang pernah tergabung sebagai anggota PETA dan HEIHO. Selain pelatihan kemiliteran, para anggota LASWI juga dibekalkan kemampuan pendukung perjuangan lain seperti menyiapkan dapur umum dan palang merah sebelum diterjunkan dalam front perjuangan.¹

¹ Perempuan Jawa yang identik berpakaian dengan kain kebaya dan konde harus berpakaian menyesuaikan mobilitas fisik pada masa Revolusi. Dartiyah Soeripto, ex anggota Laskar Putri Indonesia Surakarta menyampaikan dalam *Serba-Serbi Perjuangan* jika “mereka yang sehari-hari biasa berkain kebaya, kini *cancut tali wondo* (menyingsingkan lengan baju) mengenakan

Organisasi perempuan bersenjata lainnya didirikan di Surakarta dengan nama Laskar Perempuan Indonesia (LPI). Berdasarkan sumber berbeda, organisasi ini didirikan pada 31 Desember 1945 (Kowani, 1978:101) dan 11 Oktober 1945 (Soewito, 1992:30). Penerapan RERA (Rekonstruksi dan Rasionalisasi) oleh Kabinet Hatta pada 20 Januari 1948 menyebabkan anggota LPI yang didominasi oleh pelajar harus kembali ke bangku sekolah dan organisasi tersebut secara resmi dibubarkan pada 27 Oktober 1948.

Pasukan perempuan lain yang turut mengisi perjuangan di garis depan yaitu Wanita Pembantu Perjuangan (WAPP). Sesuai dengan namanya, organisasi yang didirikan pada tahun 1946 tersebut berfungsi menjadi komponen perjuangan dengan memberikan kontribusi kemampuan dalam mendampingi dan memperbantuan organisasi bersenjata pada wilayah-wilayah pusat pertempuran.

Keterlibatan aktif perempuan dalam perjuangan nasional yang sering disebut sebagai perang rakyat tersebut membawa pengaruh penting dalam memperkuat hubungan perempuan antar golongan pada sektor perjuangan yang lebih luas. Selain itu, pergerakan mereka bersifat dinamis, lintas perkumpulan, gender, agama, hingga kelas sosial (Wulandari, 2017: 166-167). Mereka bersinergi dengan pasukan-pasukan dan kesatuan lain dari organisasi bersenjata yang terdapat pada daerah-daerah pusat pertempuran. Status gerakannya pun tampak ganda, mulai menjadi ibu rumah

gaun atau celana panjang agar lebih praktis. Sungguh revolusi yang tidak tanggung-tanggung” (Soewito, 1995:7). Hal ini turut mengundangi kekhawatiran sejumlah orangtua untuk siap “melepaskan anak perempuannya yang cantik ke garis depan dengan menyandang senjata” saat harus melihat putrinya mengenakan celana panjang dengan menyandang senjata dan naik truk (Lihat Wieringa, 2010:148 ; Lucas & Crib, 1997: 94 – 95)

angga yang tidak tahu-menahu dengan urusan perjuangan hingga menjadi anggota organisasi bersenjata dengan merangkap fungsi dan peran serba bisa.

Setelah pengakuan kedaulatan ke tangan Republik Indonesia disepakati secara resmi pada 27 Desember 1949, sebagian besar organisasi perempuan bersenjata dibubarkan dan para anggotanya mulai menata kehidupan masing-masing. Banyak dari mereka yang kemudian berpencar-pencar karena mengikuti suami, kembali ke daerah asal, maupun melanjutkan mimpi yang sempat terkubur demi berjuang pada masa Revolusi Kemerdekaan.

C.3 Pembentukan Wadah Baru

C.3.1 Reuni Nasional

Berakhirnya perang kemerdekaan yang ditandai secara resmi oleh pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara tidak langsung turut membawa pengaruh terhadap perjuangan perempuan melalui organisasi kelaskaran. Setelah Periode Revolusi Kemerdekaan berlalu, perempuan mulai menata kehidupan baru dan kehidupan berorganisasi sempat terhenti pergerakannya (Amini, 2021:72).

Pada tahun 1976, kabar mengenai pelaksanaan reuni nasional bagi para ex-pejuang kelaskaran perempuan tersiar melalui media massa. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi para eksponen pejuang perempuan untuk kembali bersua. Berbagai cara untuk merealisasikan pelaksanaan reuni tersebut ditempuh. Persiapan konsep hingga rapat-rapat persiapan dilakukan sejak satu tahun sebelum reuni nasional diselenggarakan pada 06 Maret-08 Maret 1976.

Pembentukan Wirawati Catur Panca sebagai organisasi yang mewadahi eksponen pejuang perempuan pada masa revolusi tidak dapat dilepaskan dari peristiwa reuni nasional 06 Maret 1976. Berawal dari sapa dalam ramah tamah upacara penurunan

bendera 17 Agustus 1974, Ibu Tien Soeharto yang tengah mendampingi presiden Soeharto dihadapkan dengan ibu-ibu pejuang perempuan 45 yang terdiri dari Ny. Srikanah Koempoel (LPI), Ny. Sri Wulan Soejitno (LPI), Ny. Yati Arudji (LASWI). Momen ramah tamah tersebut seketika membangkitkan memori Ibu Tien dan ibu-ibu mantan pejuang tersebut ketika berada dalam front perjuangan. Pembicaraan seputar pengalaman perjuangan kemudian mendorong Ibu Tien untuk mencetuskan gagasan terkait pelaksanaan reuni bagi ekponen pejuang perempuan Angkatan 45.

Gagasan tersebut mendapatkan respon positif ketiganya. Pada tanggal 05 Juli 1975 diadakan pertemuan pertama di kediaman Ibu Yati Arudji sebagai tindak lanjut persiapan reuni yang dihadiri oleh Ny. Yati Arudji, Ibu Hadinegoro, Ibu Sri Suryadarma, Ibu Sri Kanah Koempoel, Ibu Pramani, Ibu Nyatani Kosasih, Ibu Dartiyah Soeripto, dan Ibu Utami Suryadarma (Soewito, 1992:84). Pertemuan tersebut berhasil menetapkan susunan panitia pelaksana dan tanggal pelaksanaan reuni.

Secara aklamasi, Ibu Yati Arudji terpilih sebagai ketua pelaksana didampingi oleh Ibu Utami Suryadarma dan Ibu Sri Kanah Koempoel. Sedangkan posisi sekretaris dipilih Sri Wulan Soejitno dan Ibu Hadinegoro ditetapkan sebagai bendahara. Adapun yang duduk sebagai Pembantu Umum adalah Ibu Dartiyah Soeripto, Ibu Nyatani Kosasih, dan Ibu Pramani (Soewito, 1992:85). Sedangkan pelaksanaan reuni ditetapkan pada tanggal 10 November 1975 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Disampaikan pula tujuan pelaksanaan reuni yaitu sebagai wadah *tepat sono* bagi para ekponen pejuang perempuan dan mengarahkan peserta untuk menyusun buku sejarah perjuangan kelaskaran perempuan di Indonesia pada periode Revolusi Kemerdekaan serta

rencana pemberian bantuan bagi rekan seperjuangan yang membutuhkan.

Gambar C.3.1.a

Para undangan kehormatan Bersama Sri Sultan H.B. IX, Ibu Tien Soeharto, Ibu



Yati Arudji Kartawinata, dan Ibu Sjaaf.

Sumber: Soewito, Irna Hadi. 1992. Lahirnya Kelaskaran Wanita dan Wirawati Catur Panca. Jakarta: Grafika.

Proses realisasi reuni dapat dikatakan tidak selalu berjalan mulus. Padatnya aktivitas pribadi antar ibu-ibu pejuang menyebabkan rapat persiapan dan pelaksanaan reuni berjalan mundur dari ketetapan. Rapat tindak lanjut pertama yang tidak dapat dilaksanakan segera setelah momen upacara penurunan bendera 17 Agustus 1974 dan pelaksanaan reuni yang baru dapat direalisasikan satu tahun setelah rapat pertemuan pertama di kediaman ibu Yati Arudji 05 Juli 1975. Disisilain, hal ini membawa pengaruh yang mengubah tujuan reuni. Dalam pertemuan antara panitia inti dengan ibu Tien Soeharto di Jalan Cendana Jakarta awal tahun 1976, disampaikan laporan mengenai rencana pelaksanaan reuni. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Tien kembali mencetuskan gagasan agar rumusan tujuan reuni dapat

direalisasikan melalui pembentukan sebuah wadah apabila reuni dapat terlaksana dengan baik. Semula, tujuan reuni yang dimaksudkan sebagai acara *tepang sono* beralih menjadi keputusan untuk membentuk suatu wadah baru perjuangan perempuan bagi para eksponen pejuang perempuan Indonesia.

Tanggal 06 Maret 1976, di Gedung Sasono Langen Budoyo Jakarta sebuah reuni nasional bagi para pejuang perempuan eks-kelaskaran digelar. Menurut catatan Sri Soejitno, para perempuan ex-kelaskaran yang hadir yaitu 70 orang ex-LASWI, 51 orang ex-LPI, 31 orang ex-BPI, dan 12 orang ex-WAPP. Jumlah peserta tersebut belum termasuk dari: angkatan 45 yang berasal dari organisasi lain; tokoh masyarakat; tokoh-tokoh perempuan pejuang seperti SK. Trimurti, Maria Ulfah, Poppy Sjahrir, Hartini Soekarno; beserta para utusan perempuan yang berasal dari ABRI yang apabila dijumlahkan total peserta keseluruhan mencapai 1500 orang yang hadir (Soewito, 1992:94-95).

Reuni nasional tersebut setidaknya diwarnai oleh dua hal penting. Pertama, reuni berfungsi sebagai media yang menyatukan perempuan dari berbagai latar belakang dan budaya. Dua hari terakhir reuni nasional tersebut berakhir dengan pertemuan intim antara eksponen pejuang perempuan. Di Istana Merdeka, dua ratus lima puluh orang dan panitia menghadap Ibu Tien Suharto. Status sosial ibu negara, istri dirjen, istri panglima, istri pejabat, dan rakyat biasa tampak tidak dibatasi oleh silaturahmi yang diselingi nostalgia dan gelak tawa (Soewito, 1992:100). Selanjutnya, peserta reuni mengunjungi Monumen Nasional dan Gedung Joang 45 untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa selama revolusi kemerdekaan. Kedua, reuni menjadi sarana untuk bertukar pikiran dan menghasilkan keputusan rencana jangka panjang untuk membentuk suatu wadah yang dapat

menghimpun para eksponen pejuang perempuan. Oleh karena itu, diputuskan membentuk formatur yang terdiri dari empat unsur kelaskaran perempuan: LASWI, LPI, WAPP, dan Barisan Putri Indonesia dengan susunan:

1. Ketua : Yati Arudji Kartawinata (LASWI).
2. Wakil : Dartiyah Soeripto (LPI)
3. Sekretaris : Sri Unun Subekti (WAPP)
4. Bendahara : Paramita Abdurachman (Barisan Putri Republik Indonesia)

Formatur bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya realisasi pembentukan wadah seperti penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Penentuan keempat unsur kelaskaran perempuan di atas sebagai formatur bukan hanya mewakili empat unsur besar kelasakan perempuan dalam periode revolusi, melainkan karena keempat unsur tersebut memiliki peran penting dalam proses realisasi reuni dan pembentukan wadah bagi para eksponen pejuang perempuan.

C.3.2 Pembentukan Yayasan Wirawati Catur Panca

Langkah awal yang dilakukan setelah formatur terbentuk adalah melakukan pertemuan antar para formatur. Pada tanggal 10 Maret 1976 di kediaman Ibu Yati Arudji, Jl HOS Cokroaminoto Jakarta diselenggarakan sebuah pertemuan untuk membahas nama serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Nama Korps Cakrawati diputuskan sebagai nama wadah bagi organisasi massa yang akan didirikan tersebut. Setelah proses pelaporan ke Markas Besar LVRI, O.B Sjaaf selaku Ketua Umum LVRI berpendapat jika pemberian nama dan tujuan pembentukan wadah sebagai organisasi massa dianggap

bertentangan dengan misi, makna, serta tinjauan Undang-Undang No.7 Tahun 1957 tentang Veteran RI. Disisi lain, pemberian nama “Cakrawati” mendapatkan penolakan di Jawa Timur dan Jakarta karena berkaitan dengan nama sejumlah pasukan yang meninggalkan kesan kurang baik pada periode Revolusi Kemerdekaan dan Orde Lama seperti Barisan Cakra dan Pasukan Cakrabirawa (Soewito, 1992:106). Oleh karena itu, para formatur kembali melakukan perundingan untuk menetapkan sebuah nama.

Pada tanggal 18 Juni 1976, digelar sebuah pertemuan di Gedung Joang 45 Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Yati Arudji menyampaikan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah berhasil disusun. Pertemuan tersebut juga berhasil menyepakati pembentukan wadah bagi para eksponen pejuang perempuan meskipun wadah tersebut belum memiliki nama. Atas usul Ibu Hadinegoro dan Ibu Utami Suryadarma, pada tanggal 23 Juni 1976 Ibu Yati Arudji mengirimkan surat kepada Prof. Dr. Mahar Mardjono, Rektor Universitas Indonesia. Tujuan pengiriman surat tersebut adalah agar Prof. Dr. Mahar Mardjono dapat membantu memberikan sebuah nama bagi bayi yang baru lahir tersebut. Tanggal 02 Juli 1976, secarik surat jawaban pun tiba. Atas permintaan Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Haryati Subandio selaku guru besar Ilmu Sastra Universitas Indonesia memberikan nama Wirawati Catur Panca. Nama Wirawati Catur Panca mendapatkan persetujuan dan dukungan sebagai nama wadah bagi para eksponen pejuang perempuan. Nama Wirawati Catur Panca memiliki arti wanita pejuang empat lima.

Pada awal pendiriannya, para formatur yang mewakili empat unsur kelaskaran telah memisahkan dan menyendirikan dari harta kekayaan masing-masing sejumlah uang dengan total nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai modal untuk

mendirikan suatu yayasan. Dalam menjalankan aktivitas organisasi, Yayasan Wirawati Catur Panca yang baru berdiri tidak memiliki modal serta bantuan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor maupun penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, dana didapatkan dari sumbangan pengurus maupun gotong royong biaya pribadi. Mayoritas pengurus Wirawati yang berasal dari golongan masyarakat menengah ke atas untuk sementara dapat mengatasi kendala tersebut.

C.3.3 Tujuan Pembentukan Yayasan Wirawati Catur Panca

Rencana pelaksanaan reuni diarahkan untuk menghasilkan rencana jangka panjang selain sarana melepaskan rindu. Rencana tersebut ditujukan untuk generasi yang akan datang, bukan hanya para peserta reuni. Hasil dari rapat pertemuan pertama pada tanggal 5 Juli 1975, memutuskan bahwa pertemuan akan dilaksanakan sebagai upaya untuk memajukan bidang pendidikan dan sosial. Agar agar tujuan tersebut dapat tercapai secara terorganisir, dibutuhkan suatu wadah berbentuk organisasi untuk merealisasikannya.

Dalam rapat internal penyampaian laporan rencana pelaksanaan awal tahun 1976, Ibu Tien Soeharto pertama kali menyampaikan tujuan pendirian Wirawati. Tujuan ini kemudian disampaikan secara terbuka di Wisma Tanah Air Jakarta tanggal 06 Maret 1976 oleh panitia penyelenggara reuni. Dalam pertemuan petang hari tersebut, disimpulkan bahwa pembentukan organisasi menginginkan agar persaudaraan antar eksponen pejuang perempuan dapat terjalin erat, memperkuat persatuan, dan diharapkan dapat bahu membahu meringankan beban sesama rekan (Soewito, 1992:99).

Tujuan pembentukan Wirawati dituangkan dalam Pasal 4 Akta Pendirian

Yayasan Wirawati Catur Panca yang ditujukan bagi anggota, keluarga anggota, serta generasi mendatang. Bagi anggota, Wirawati diharapkan dapat membina kekeluargaan ex-anggota kelaskaran perempuan Indonesia sebagaimana sifat organisasi yang kekeluargaan dan non politik. Selain itu pendirian Wirawati bertujuan untuk meringankan beban anggota yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan serta menyediakan beasiswa bagi keturunan anggota. Agar data mengenai perempuan-perempuan yang pernah tergabung dalam organisasi kelaskaran dapat diinventarisasi, pencatatan kembali eksponen perempuan tersebut menjadi salah satu tujuan yang dituangkan dalam akta pendirian Wirawati. Selain menjadi data inventarisasi bagi yayasan, pencatatan juga berfungsi membantu pengurus menindaklanjuti penyelesaian pendaftaran anggota sebagai anggota veteran Republik Indonesia.

C.3.4 Keanggotaan dan Susunan Kepengurusan Wirawati Catur Panca

Wirawati Catur Panca merupakan organisasi perempuan yang dibentuk melalui mobilisasi eksponen pejuang perempuan dalam periode Revolusi Kemerdekaan. Keanggotaan Wirawati terbuka bagi mereka yang pada periode revolusi fisik 1945-1949 tergabung dalam perjuangan di garis depan maupun di garis belakang.

Sebagai suatu perhimpunan, Yayasan Wirawati Catur Panca memiliki struktur kepengurusan yang terdiri atas badan pengurus, badan pengawas, pelindung, sesepuh, dan penasehat. Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Wirawati Catur Panca yang disahkan pada 02 Juni 1977, susunan pengurus Yayasan Wirawati Catur Panca adalah sebagai berikut:

Pelindung : Sri Sultan
Hamengkubuwono IX

Sesepuh : Siti Hartinah Soeharto
Penasehat : Jenderal Soerono
Laksamana O.B Sjaaf
Yati Arudji Kartawinata
Prof. Dr. Yuli Sulianti Saroso
Sri Kanah Koempoel
Ketua I : Yo Chairul Saleh
Ketua II : Sri Soeyitno
Sekretaris I : L.K Sadikin
Sekretaris II : Kolonel Moelyati
Bendahara : Pratiwi Siswadi

C.3.5 Tokoh Wirawati Catur Panca

Aktivitas Yayasan Wirawati Catur Panca sebagai organisasi tidak dapat dipisahkan dari peran beberapa tokoh penting di dalamnya. Eksistensi tokoh tersebut berperan dalam memberikan gagasan dan proses pembentukan organisasi. Tokoh Wirawati Catur Panca yang berperan aktif dalam memberikan ide, inspirasi, dan ruh dalam pembentukan organisasi adalah Ibu Tien Soeharto dan Ibu Yati Arudji.

C.3.5.a Ibu Tien Soeharto

Ibu Tien memiliki peran penting dalam Wirawati. Peran tersebut diperlihatkan dari mulai pembentukan hingga aktivitas organisasi. Beliau merupakan pencetus gagasan reuni yang mempertemukan para pejuang perempuan 45 dalam sebuah pertemuan nasional. Beliau juga menjadi pencetus agar para eksponen pejuang perempuan tersebut dapat dihimpun dalam suatu wadah nasional. Terselenggaranya reuni di sebuah bangunan induk mega proyek kebudayaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh beliau. Ketika Wirawati berhasil didirikan sebagai organisasi, ibu Tien tidak hanya berperan sebagai penasehat dalam susunan kepengurusan. Beliau membantu organisasi merealisasikan panti Wirawati melalui Yayasan Dharmais milik sang suami.

C.3.5.b Ibu Yati Atudji

Ibu Yati Arudji merupakan salah satu tokoh dalam pembentukan Wirawati. Beliau dipilih dan dipercaya untuk menjadi ketua pelaksana reuni nasional eksponen pejuang perempuan Indonesia. Kediannya yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto 16, Jakarta sudah dianggap sebagai markas pada masa revolusi, dimana setiap waktu orang datang dan berkumpul untuk bertukar pikiran dan menyusun rencana.

C.3.6 Memaknai Reuni dalam Pembentukan Wirawati

Pelaksanaan reuni nasional membawa makna tersendiri dalam pendirian Wirawati Catur Panca. Melalui reuni para pejuang perempuan yang tersebar di berbagai daerah, berbagai latar belakang, dan budaya berkumpul untuk bersilaturahmi dan berdiskusi membahas rencana jangka panjang melalui perencanaan pembentukan wadah baru. Pertemuan ini merupakan bentuk nasionalisme yang dilakukan untuk melestarikan semangat dan nilai-nilai perjuangan serta mendukung pembangunan nasional yang tengah berjalan.

Melalui pembentukan wadah baru yang kemudian dikenal dengan nama Wirawati Catur Panca, perempuan dapat menyusun rencana strategis bagi perkembangan organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Secara tidak langsung, pendirian Wirawati Catur Panca menjadi babak baru pergerakan perempuan yang sebelumnya terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah sempat terhenti pergerakannya, para perempuan yang tergabung dalam Wirawati mulai mengisi kesempatan di dalam organisasi melalui bidang pendidikan maupun bidang sosial. Atas kegigihan dan semangat pengurus dan anggota, Wirawati Catur Panca menjadi wadah nasional bagi para pejuang ex-organisasi kelaskaran perempuan yang masih bertahan hingga saat ini. Hal ini

menjadi bukti bahwa Wirawati Catur Panca dapat berdiri dengan kuat dalam membangkitkan perjuangan dan membaktikan diri dalam tugas-tugas perjuangan yang baru.

D. Kesimpulan

Organisasi perempuan Wirawati Catur Panca sebagai suatu organisasi yang mewadahi ide pejuang wanita yang tergabung ke dalam organisasi kelaskaran perempuan memiliki perubahan dari masa ke masa, khususnya dari Periode Revolusi Kemerdekaan ke masa damai pada masa Orde Lama hingga Periode Orde Baru. Pembentukan Wirawati Catur Panca tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ibu Tien Soeharto dan Ibu Yati Arudji. Tanpa peran Ibu Tien, gagasan untuk memobilisasi mantan eksponen pejuang perempuan ke dalam wadah perjuangan baru tidak akan terwujud. Dan tanpa peran Ibu Yati Arudji, gagasan pelaksanaan reuni dan pendirian Wirawati tidak akan terealisasi.

Sebagai organisasi perempuan, pendirian Wirawati Catur Panca juga tidak dipisahkan dari dukungan kaum pria. Hal ini dapat terlihat melalui dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Laksamana O.B Sjaaf, dan Jenderal Soerono yang duduk sebagai pelindung dan penasihat organisasi. Wirawati Catur Panca menjadi wadah bagi para mantan pejuang perempuan pada periode Revolusi Kemerdekaan. Yang tidak hanya menjadi tempat berkumpul membahas permasalahan non formal namun menjadi wadah bertukar pikiran dalam mencapai tujuan organisasi.

E. Daftar Pustaka

Majalah

Arsip, Edisi 59, September-Desember 2012.

Buku

Amini, Mutiah. (2021). *Sejarah Organisasi*

- Perempuan Indonesia: 1928-1998*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gottschalk, Louis. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Universitas Indonesia Press.
- Kartodirjo, Sartono. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium (Jilid I)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kowani. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- . (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Lucas, Anton, & Cribb, Robert. (1997). *Peranan Wanita Dalam Revolusi Indonesia: Sebuah Renungan Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Notosusanto, Nugroho. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . (1985). *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Agape Press.
- Ricklefs, M.C. (2010). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi.
- Smail, R.W. John. (2011). *Bandung Awal Revolusi 1945-1946*. Jakarta: Ka Bandung.
- Soewito, Irna Hadi. (1992). *Lahirnya Kelasykaran Wanita dan Wirawati Catur Panca*. Yayasan Wirawati Catur Panca.
- Stuers, Cora Vreede-De. (2017). *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Wieringa, Saskia. E. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyamitra.
- Wulandari, Tiara. (2017). *Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dokumen

Laporan Hasil Musyawarah Nasional I Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, 01-03 Juni 1983.

Anggaran Dasar Pendirian Yayasan Wirawati Catur Panca, 02 Juni 1977.

Anggaran Dasar Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, 17 Juni 1983.

Artikel Jurnal

Sasi, Galuh Ambar. (2021). Perwari dalam Kemelur Revolusi Indonesia: Gejolak di Awal Gerak. *Jurnal Sejarah*. Vol. 4 No.1, 36 -51.

<https://jurnalsejarah.org/index.php/js/article/view/5/5> diakses pada 12 April 2023 pukul 22.30 WIB.